JPIM: Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner
Vol. 03, No. 02, Tahun 2026, Hal. 539 -544, ISSN: 3089-0128 (Online)

Tindakan Pemerintah Setempat Dalam Menanggulangi Sampah Yang Berserakan di Jalan Raya

Nurni Eryani [1], syamsiah[2]
Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum Institut Islam Muaro Jambi
Nurnieryani2@gmail.com[1], rosyasyam4@gmail.com

Article Info

Article history:
Received Oktober 14, 2026
Revised Oktober 25, 2026
Accepted November 05, 2026

Keywords:
Government Actions, Roadside Littering, Public Roads, Waste Management, Public Policy

ABSTRACT

The problem of littering on public roads remains one of the major environmental issues in Jambi CityThis study aims to analyze local government actions in addressing roadside littering and identify the supporting and inhibiting factors in its implementation. This research uses a descriptive qualitative approach, with data collected through direct observation, in-depth interviews with 10 informants, and documentation. The findings indicate that the local government has implemented three types of measures: waste collection vehicles, and community clean-up activities; and repressive actions through warnings, cleanliness inspections, and fines. However, these measures have not been implemented optimally due to low public awareness, limited facilities and infrastructure, budget constraints, insufficient personnel, and weak supervision and law enforcement. Therefore, improvements in waste management facilities, more effective supervision, consistent law enforcement, and greater public participation are necessary to maintain environmental cleanliness and create a cleaner urban environment.

This is an open access article under the CC BY-SA license.

Article Info

Article history:
Received Oktober 14, 2026
Revised Oktober 25, 2026
Accepted November 05, 2026

Keywords:

Tindakan Pemerintah, Sampah Berserakan, Jalan Raya, Pengelolaan Sampah, Kebijakan Publik.

ABSTRAK

Permasalahan sampah yang berserakan di jalan raya masih menjadi salah satu persoalan lingkungan perkotaan di Kota Jambi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tindakan pemerintah setempat dalam menanggulangi sampah yang berserakan di jalan raya serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam terhadap 10 informan, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah telah melakukan tiga bentuk tindakan, yaitu preventif melalui sosialisasi, edukasi, dan penyediaan tempat sampah; kuratif melalui pengerahan petugas kebersihan, penambahan armada, dan gotong royong; serta represif melalui teguran, razia kebersihan, dan penerapan sanksi. Namun, pelaksanaannya belum optimal karena rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan sarana dan prasarana, anggaran, serta jumlah petugas, disertai lemahnya pengawasan dan penegakan sanksi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan fasilitas kebersihan, pengawasan yang lebih efektif, penerapan sanksi secara konsisten, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.

This is an open access article under the CC BY-SA license.

Corresponding Author:
Nurni Eryani
Fakultas Syariah dan Hukum Institut Islam Muaro Jambi
E-mail: Nurnieryani2@gmail.com

Pendahuluan

Kota sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan aktivitas masyarakat selalu dihadapkan pada permasalahan sampah. Pertumbuhan jumlah penduduk yang semakin meningkat berbanding lurus dengan peningkatan volume sampah yang dihasilkan. Perkembangan wilayah perkotaan yang pesat tanpa diimbangi oleh sistem tata kelola sampah yang memadai telah memicu krisis kebersihan lingkungan yang berpotensi menurunkan taraf kualitas hidup warga kota secara berkelanjutan.

Berdasarkan data resmi Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi tahun 2025, volume sampah di Kota Jambi mencapai 450-500 ton per hari, dan sekitar 15% di antaranya berserakan di jalan raya serta fasilitas umum. Angka tersebut mencerminkan betapa besarnya tantangan operasional harian dalam memobilisasi armada pengangkut dan personil kebersihan di titik-titik krusial perkotaan.

Jalan raya merupakan wajah sebuah kota. Jalan yang bersih mencerminkan tertibnya masyarakat dan baiknya tata kelola pemerintahan. Namun, fenomena yang terjadi di lapangan menunjukkan sebaliknya. Di sepanjang jalan utama Kota Jambi, seperti Jalan Jend. Sudirman, Jalan Pattimura, dan Jalan Soekarno-Hatta, masih sering ditemukan tumpukan sampah plastik, bungkus makanan, botol minuman, hingga sampah rumah tangga yang dibuang dari kendaraan.

Sampah yang berserakan tersebut menimbulkan berbagai dampak yang saling berkaitan erat secara multidimensional. Pertama, dampak kesehatan: sampah yang menumpuk menjadi sarang lalat, tikus, dan nyamuk pembawa penyakit berbahaya seperti demam berdarah dan diare. Kedua, dampak lingkungan: sampah plastik yang terbawa air masuk ke saluran drainase perkotaan sehingga menyebabkan penyumbatan parah yang berujung pada luapan banjir saat hujan deras. Ketiga, dampak sosial dan ekonomi: kondisi jalanan yang kotor menurunkan estetika, kenyamanan pengguna jalan, serta merusak reputasi citra Kota Jambi sebagai kota perkotaan yang bersih, tertib, dan layak investasi.

Pemerintah sebagai pemegang otoritas memiliki tanggung jawab utama dalam pengelolaan sampah. Hal ini telah diatur secara meyakinkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah. Dalam regulasi-regulasi tersebut ditegaskan bahwa pemerintah daerah wajib menyediakan sarana prasarana yang memadai, menyelenggarakan pengangkutan yang efisien, dan memberikan pembinaan serta edukasi berkelanjutan kepada seluruh lapisan masyarakat.

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah daerah, permasalahan sampah di sepanjang jalan raya masih terus berulang setiap hari. Hal ini menimbulkan pertanyaan fundamental: apakah tindakan pemerintah sudah efektif? Atau masih ada faktor eksternal dan internal lain yang menyulitkan penyelesaian masalah ini secara permanen? Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengkaji secara mendalam tentang tindakan pemerintah setempat dalam menanggulangi sampah yang berserakan di jalan raya.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan spesifikasi deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena tindakan pemerintah, situasi sosial, serta pola perilaku masyarakat terkait pembuangan sampah di jalan raya Kota Jambi secara alamiah tanpa memanipulasi variabel.

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah administrasi Kota Jambi, fokus pada tiga koridor jalan utama yang berkategori padat lalu lintas dan rawan sampah, yaitu Jalan Jend. Sudirman, Jalan Pattimura, dan Jalan Soekarno-Hatta. Waktu penelitian berlangsung selama tiga bulan, terhitung sejak bulan September hingga November 2026.

Penentuan informan dilakukan secara sengaja (purposive sampling) berdasarkan kriteria yang relevan dengan fokus kajian. Jumlah total informan ditetapkan sebanyak 10 orang, dengan rincian sebagaimana disajikan pada Tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1 Daftar Informan Penelitian

No	Kategori Informan	Jumlah
1	Kepala Bidang Kebersihan DLH Kota Jambi	1 Orang
2	Petugas Kebersihan Lapangan (Penyapu Jalan)	3 Orang
3	Lurah Wilayah Koridor Jalan	1 Orang
4	Pedagang Kaki Lima (PKL) Jalan Raya	2 Orang
5	Pengguna Jalan / Masyarakat Umum	3 Orang

Untuk memperoleh data yang sahih dan komprehensif, penelitian ini menerapkan tiga teknik pengumpulan data, yaitu observasi *fieldwork*, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Observasi *fieldwork* dilakukan melalui pengamatan secara langsung terhadap kondisi fisik jalan raya, pola persebaran titik penumpukan sampah, ketersediaan sarana tempat sampah, serta aktivitas pembuangan sampah yang berlangsung pada pagi, siang, dan malam hari. Selanjutnya, wawancara mendalam dilakukan secara semi-terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara tertulis untuk menggali informasi secara lebih mendalam mengenai kebijakan, pelaksanaan operasional, serta tanggapan para informan terhadap permasalahan yang diteliti. Sementara itu, studi dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen pendukung, seperti Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 4 Tahun 2020, data statistik volume sampah tahunan, laporan akuntabilitas Dinas Lingkungan Hidup (DLH), serta arsip foto yang menggambarkan kondisi kebersihan di lokasi penelitian.

Teknik analisis data dalam penelitian ini mengadopsi model analisis interaktif Miles dan Huberman yang meliputi tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Tahap reduksi data dilakukan dengan mengklasifikasikan, menyeleksi, dan menyaring data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi agar sesuai dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk uraian naratif dan tabel secara sistematis sehingga memudahkan peneliti dalam memahami serta menginterpretasikan informasi yang diperoleh. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu proses merumuskan temuan penelitian berdasarkan data yang telah dianalisis serta melakukan pemeriksaan kembali untuk memastikan kesesuaian dan konsistensi hasil penelitian. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik pengumpulan data. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan, sedangkan

triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan data hasil observasi, wawancara, dan studi dokumentasi.

Hasil dan Pembahasan

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kota Jambi merupakan pusat pemerintahan sekaligus pusat perekonomian Provinsi Jambi dengan luas wilayah 205,38 km² dan populasi mencapai lebih dari 620.000 jiwa. Seiring pesatnya aktivitas perdagangan dan pergerakan transportasi antar wilayah, jaringan jalan raya utama Kota Jambi memegang peran strategis. Namun, intensitas mobilitas yang tinggi ini juga berimplikasi langsung pada tingginya laju produksi sampah harian.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, titik-titik yang paling rentan terhadap penumpukan sampah berserakan berada di sekitar kawasan pasar tradisional, area halte bus, dan persimpangan lampu merah. Komposisi jenis sampah yang berhasil diidentifikasi di sepanjang jalan raya didominasi oleh sampah kemasan plastik (45%), diikuti sampah sisa makanan/organik (30%), sampah kertas/dus (15%), serta jenis sampah material lain (10%).

Tindakan Pemerintah Setempat

Hasil investigasi kualitatif menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Jambi melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) telah menanggulangi sampah berserakan melalui tiga pilar tindakan utama:

A. Tindakan Preventif (Pencegahan)

1. Sosialisasi dan Edukasi PublikDLH Kota Jambi melakukan kegiatan penyuluhan ke sekolah-sekolah melalui program Sekolah Adiwiyata, kelurahan terpadu, serta pemanfaatan media sosial Instagram official (@dlh_kotajambi). Pemerintah juga memasang spanduk dan baliho peringatan bertuliskan 'Dilarang Membuang Sampah Sembarangan - Denda Maksimal Rp. 500.000' di 25 lokasi strategis.

2. Penyediaan Sarana tempat Sampah: Telah ditempatkan sebanyak 120 unit tempat sampah pilah 2-warna (organik dan anorganik) di sepanjang trotoar jalan utama guna memudahkan pejalan kaki dan pedagang membuang sampah.

3. Program Jumat Bersih: Pelaksanaan aksi gotong royong kebersihan rutin setiap hari Jumat pagi yang mengintegrasikan personil DLH, aparat TNI/Polri, organisasi kepemudaan, serta warga lokal.

B. Tindakan Kuratif (Penanganan Operasional)

1. Pengerahan Petugas Kebersihan: DLH menerjunkan 250 personil kebersihan (pasukan kuning) yang terbagi ke dalam 3 shift kerja operasional: Shift I (05.00-08.00 WIB), Shift II (11.00-13.00 WIB), dan Shift III (19.00-21.00 WIB) untuk menyapu dan membersihkan bahu jalan.

2. Optimalisasi Armada Angkut: Pengoperasian 35 unit truk dump dan 20 unit motor sampah roda Tiga untuk mengangkut sampah dari TPS jalanan menuju Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Talang Gulo dengan frekuensi pengangkutan 2 kali sehari.

3. Pembentukan Satgas Patroli Kebersihan: Pembentukan tim reaksi cepat (Satgas Kebersihan) yang berpatroli mengelilingi jalan protokol untuk mengangkut ceceran sampah darurat yang tidak tercover jadwal reguler.

C. Tindakan Represif (Penegakan Hukum)

1. Teguran Lisan: Pemberian peringatan lisan di tempat oleh petugas lapangan kepada pengendara atau pejalan kaki yang kedapatan membuang sampah sembarangan.
2. Razia Kebersihan Gabungan: Penyelenggaraan operasi tangkap tangan (OTT) gabungan bersama Satpol PP secara berkala sebulan sekali di titik rawan pelanggaran.
3. Penindakan Sanksi Denda: Penerapan sanksi denda administrasi sesuai Perda Kota Jambi No. 4 Tahun 2020. Meskipun demikian, tercatat baru 12 pelanggar yang dikenakan penindakan yustisi sepanjang 2025-2026 karena keterbatasan personil pengawas dan kesulitan pembuktian di lapangan

Faktor Pendukung dan Penghambat

Pelaksanaan tindakan pemerintah setempat dipengaruhi oleh serangkaian faktor internal dan eksternal:
Faktor Pendukung: Landasan hukum yang tegas (UU No. 18/2008 & Perda No. 4/2020), alokasi anggaran APBD kebersihan sebesar Rp 12 Miliar pada tahun 2026, serta dukungan dari komunitas pengelola Bank Sampah lokal.
Faktor Penghambat: Rendahnya budaya malu membuang sampah sembarangan di kalangan masyarakat (7 dari 10 informan menganggap remut limbah kecil); keterbatasan jumlah tempat sampah umum (jarak antar tong mencapai 500 meter); rasio petugas tidak seimbang dengan panjang total jalan (150 km); serta belum konsistennya penegakan hukum.

Tindakan Pemerintah Kota Jambi secara konseptual telah menyelaraskan tiga dimensi penanganan yang dirumuskan oleh Thoha (2012). Namun, pada tataran praktis, tindakan preventif masih cenderung seremonial dan belum membentuk perubahan perilaku permanen. Di sisi lain, tindakan represif yang lemah menyebabkan sanksi Perda kehilangan daya jera (deterrent effect).

Sebagaimana disimpulkan dalam studi Wijaya (2023), penegakan hukum yang konsisten terbukti sanggup menekan angka kejahatan lingkungan hingga 40%. Hal ini menegaskan bahwa keberhasilan penanggulangan sampah jalanan di Kota Jambi sangat bergantung pada keberanian pemerintah untuk menyeimbangkan penyediaan sarana fisik dengan penegakan sanksi yustisi yang tegas.

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa:Pemerintah Kota Jambi melalui Dinas Lingkungan Hidup telah menanggulangi sampah yang berserakan di jalan raya melalui tiga pendekatan tindakan: preventif (sosialisasi, penyediaan tempat sampah, Jumat bersih), kuratif (pengerahan 250 petugas, 35 truk sampah, tim satgas), dan represif (teguran, razia, sanksi Perda).

Tindakan yang dijalankan oleh pemerintah setempat belum berlangsung secara optimal, ditunjukkan oleh masih ditemukannya tumpukan sampah berserakan pada jam-jam tertentu di ruas jalan protokol.Faktor penghambat utama meliputi rendahnya kesadaran publik, minimnya jumlah tempat sampah publik, keterbatasan armada dan personil, serta belum tegasnya enforcement penegakan sanksi denda bagi para pelanggar.

Daftar Pustaka

Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi. (2025). Laporan Volume Sampah dan Pengelolaan Kebijakan Kebersihan Perkotaan Kota Jambi. Jambi: DLH.

Ndraha, T. (2011). Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru). Jakarta: Rineka Cipta.

Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah.

Pratama, A. (2021). Pengelolaan Sampah Perkotaan dan Partisipasi Masyarakat. Jurnal Administrasi Publik, 9(2), 45-60.

Sari, D. (2022). Efektivitas Bank Sampah dalam Mengurangi Volume Sampah Perkotaan. Jurnal Ilmu Lingkungan, 5(1), 12-25.

Sugiyono. (2020). Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Thoha, M. (2012). Ilmu Administrasi Publik Kontemporer. Jakarta: Kencana.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Wijaya, C. (2023). Kebijakan Kebersihan dan Penegakan Sanksi Lingkungan di Perkotaan. Jurnal Kebijakan Publik Indonesia, 11(3), 101-115.